



DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN PUNGUTAN TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA GURU DI KABUPATEN KARAWANG

Oleh:

Tedy Andrian^{1*}, Icih Surnasih², Imamah³

^{1*,2,3}Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Panca Sakti Bekasi

*Email: tedyandrian@gmail.com¹, icihsurnasih4@gmail.com², nuril12imamah@gmail.com³

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i2.3002>

Article info:

Submitted: 26/04/25

Accepted: 15/05/25

Published: 30/05/25

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan larangan pungutan di sekolah negeri terhadap motivasi dan kinerja guru. Kebijakan ini diterapkan di Karawang melalui Instruksi Bupati Nomor 100.3.4.2/322/Inspt/2025, yang melarang pungutan, termasuk iuran sukarela dari orang tua siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap enam guru sekolah dasar dan menengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak menurunkan motivasi intrinsik guru. Meskipun mengalami keterbatasan fasilitas, guru tetap berkomitmen tinggi dan berinovasi dengan memanfaatkan bahan ajar digital dan kolaborasi antar guru. Namun, kebijakan ini menyebabkan penurunan ketersediaan sarana pembelajaran yang sebelumnya didukung oleh iuran sukarela. Dukungan dari institusi pendidikan, seperti Dinas Pendidikan dan sekolah, masih dirasakan belum optimal, sehingga guru mengharapkan peningkatan fasilitas dan pelatihan. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memperbaiki hubungan antara sekolah dan masyarakat dengan mengurangi beban biaya bagi orang tua. Namun, tanpa dukungan pendanaan yang jelas, kebijakan ini dapat menimbulkan frustrasi di kalangan guru dan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan pungutan berpotensi meningkatkan transparansi pendidikan, namun membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk menjaga kualitas pembelajaran.

Kata Kunci: Kebijakan Larangan Pungutan, Motivasi Guru, Kinerja Guru, Pendidikan Gratis, Sumber Daya Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata dan bebas biaya bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah Instruksi Bupati Karawang Nomor 100.3.4.2/322/Inspt/2025, yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri, termasuk penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam sekolah, serta kegiatan seperti study tour (Lintas Karawang, 2025). Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan bebas dari praktik pungutan liar yang dapat membebani orang tua siswa.

Namun, penerapan kebijakan ini menimbulkan tantangan baru bagi tenaga pendidik, terutama dalam aspek motivasi dan kinerja guru. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, banyak guru mengandalkan dana dari iuran sukarela untuk pengadaan bahan ajar guna mendukung proses pembelajaran. Dengan adanya larangan ini, guru menghadapi keterbatasan sumber daya yang dapat berdampak pada kualitas pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan motivasi mengajarnya tanpa harus bergantung pada anggaran tambahan.



Motivasi guru memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Studi yang dilakukan oleh Nery (2021) menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru, di mana semakin tinggi motivasi, semakin baik pula kualitas pengajaran yang diberikan. Selain itu, penelitian oleh Ningsih (2020) mengungkapkan bahwa insentif dan lingkungan kerja yang mendukung turut berkontribusi terhadap peningkatan motivasi guru dalam mengajar. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti bagaimana kebijakan ini mempengaruhi motivasi guru dalam menjalankan tugasnya.

Selain motivasi, kinerja guru juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pembelajaran. Kinerja tidak hanya mencakup kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas dalam pengajaran, penggunaan metode yang efektif, serta interaksi dengan siswa. Penelitian oleh Putro (2020) menemukan bahwa motivasi kerja guru memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,8% terhadap kinerja guru, sehingga sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah kebijakan baru ini menghambat inovasi dalam pembelajaran akibat keterbatasan sumber daya atau justru mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menyusun strategi pengajaran.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas dampak kebijakan larangan pungutan terhadap tenaga pendidik. Sebagian besar studi masih berfokus pada perspektif siswa dan orang tua terkait kebijakan pendidikan gratis (Setiawan 2023), sementara dampaknya terhadap guru belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroti perspektif guru dalam menghadapi kebijakan ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Karawang dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Jika ditemukan dampak negatif yang signifikan terhadap motivasi dan kinerja guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih seimbang—yang tetap menjaga transparansi pendidikan tanpa menghambat proses pembelajaran (Rahman & Putri, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan pungutan di sekolah negeri bertujuan menciptakan pendidikan yang lebih adil dan bebas biaya, namun berdampak pada sumber daya yang tersedia bagi guru dalam menunjang proses pembelajaran. Studi oleh Nery (2021) dan Ningsih (2020) menegaskan bahwa motivasi guru sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan kerja dan insentif, yang seringkali terkait dengan dana tambahan dari pungutan atau iuran sukarela. Tanpa adanya sumber pendanaan alternatif, guru menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas pengajaran dan inovasi metode pembelajaran.

Penelitian Putro (2020) juga mengungkapkan bahwa motivasi berkontribusi signifikan terhadap kinerja guru, sehingga perubahan kebijakan dapat memengaruhi efektivitas pengajaran secara langsung. Namun, masih sedikit kajian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan larangan pungutan ini mempengaruhi motivasi dan kinerja guru secara spesifik, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih seimbang.

Penelitian ini menjadi penting karena perubahan kebijakan di Karawang berpotensi membawa dampak langsung terhadap motivasi dan kinerja guru, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan meneliti faktor-faktor ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang diterapkan tetap mendukung kesejahteraan guru serta efektivitas pembelajaran di sekolah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Informan penelitian adalah lima orang guru yang dipilih secara purposif. Wawancara dilakukan pada bulan Maret hingga April 2025. Peneliti menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, dan praktik guru dalam pembelajaran, khususnya dalam konteks



penerapan kebijakan larangan pungutan di sekolah negeri. Setiap wawancara berlangsung selama 30–60 menit dan direkam dengan persetujuan partisipan. Selain itu, peneliti mencatat pula ekspresi non-verbal yang muncul selama wawancara sebagai data pelengkap. Seluruh data yang diperoleh ditranskripsikan secara verbatim dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik.

Tabel Partisipan Penelitian

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Usia	Jenjang Sekolah	Lama Mengajar
1	AA	Perempuan	24	SD	1-3 Tahun
2	EK	Perempuan	52	SD	Lebih dari 6 Tahun
3	Ade	Laki-Laki	25	SMP	1-3 Tahun
4	Mk	Perempuan	26	SD	1-3 Tahun
5	MS	Laki-Laki	40	SD	Lebih dari 6 Tahun

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kebijakan terhadap Motivasi Guru

Mayoritas guru yang menjadi responden dalam penelitian ini mengaku bahwa kebijakan larangan pungutan di sekolah negeri tidak serta merta menurunkan motivasi mereka dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Mereka menyatakan bahwa dedikasi mereka sebagai pendidik tetap tinggi, bahkan dalam kondisi keterbatasan.

Beberapa responden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mendorong mereka untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran agar tetap efektif dan menyenangkan, meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

“Saya tidak terpengaruh, selalu semangat dalam mengajar. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai pendidik.” (Partisipan Ade)

“Saya menjadi lebih kreatif dalam mengajar dan membuat media pembelajaran dari barang bekas atau materi digital.” (Partisipan AA)

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik guru—yang didorong oleh nilai-nilai pengabdian dan tanggung jawab profesi—masih menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pendidikan, meskipun dalam kondisi yang menantang.

2. Tantangan yang Dihadapi Guru

Kebijakan pelarangan pungutan ternyata menimbulkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional di sekolah. Beberapa guru mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan penurunan ketersediaan alat peraga, bahan ajar tambahan, dan sarana pendukung lainnya yang sebelumnya bisa diperoleh dari sumbangan sukarela orang tua siswa.

“Keterbatasan fasilitas menjadi tantangan utama. Kadang kami harus putar otak bagaimana mengajar tanpa alat bantu.” (Partisipan AA)

“Keluhan dari orang tua dan siswa meningkat karena tidak semua kebutuhan pembelajaran bisa dipenuhi sekolah.” (Partisipan MK)

Tantangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik, jika tidak dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung, dapat menciptakan beban baru bagi tenaga pendidik.



3. Strategi Adaptasi Guru

Dalam menghadapi tantangan tersebut, para guru menunjukkan berbagai bentuk adaptasi yang positif. Mereka mengembangkan kreativitas dengan memanfaatkan bahan ajar digital, berkolaborasi dengan sesama guru, hingga mencari sumber pembelajaran yang murah bahkan gratis.

“Saya mencari bahan ajar secara online dan memanfaatkan buku paket semaksimal mungkin.” (Partisipan MK)

“Kami lebih aktif membuat media sendiri dan saling berbagi dengan guru lain.” (Partisipan MS)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya terbatas, semangat inovasi tetap hadir dalam diri guru sebagai respon terhadap kebijakan.

4. Dukungan Institusi

Sebagian besar guru merasakan bahwa dukungan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Karawang terhadap pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Dukungan yang dirasakan masih bersifat administratif, belum menyentuh aspek kebutuhan praktis di lapangan seperti peningkatan sarana dan kesejahteraan guru.

“Dukungan sekolah ada, tapi terbatas. Kami butuh lebih banyak pelatihan dan fasilitas pembelajaran.” (Partisipan EK)

“Dinas seharusnya lebih aktif dalam memfasilitasi kebutuhan guru pasca kebijakan ini.” (Partisipan MS)

Kurangnya dukungan tersebut dapat berdampak pada kualitas pengajaran dalam jangka panjang jika tidak segera ditangani.

5. Harapan dan Saran Guru

Sebagian besar guru menyampaikan harapan agar pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memperkuat pelaksanaannya dengan kebijakan turunan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

“Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengganti agar larangan pungutan tidak mengganggu proses belajar mengajar.” (Partisipan AA)

“Kami berharap ada pelatihan berkala, insentif tambahan, dan bantuan sarana dari pemerintah.” (Partisipan Ade)

Mereka juga mengusulkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak terjadi multitafsir di lapangan.

6. Pandangan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, guru menilai bahwa kebijakan ini berpotensi memperbaiki hubungan antara sekolah dan masyarakat. Tanpa adanya beban biaya tambahan, orang tua lebih percaya kepada sekolah dan tidak lagi menganggap pendidikan sebagai beban finansial.

“Dengan tidak adanya pungutan, masyarakat akan lebih percaya kepada sekolah.” (Partisipan ES)

“Relasi guru, siswa, dan orang tua menjadi lebih terbuka karena semua pihak merasa diperlakukan adil.” (Partisipan Ade)

Namun, guru juga mengingatkan bahwa tanpa pendanaan alternatif yang jelas, kebijakan ini bisa menimbulkan frustrasi di kalangan orang tua, peserta didik, serta pastinya tenaga pendidik yang berdampak pada mutu pendidikan.

“Saat larangan diberlakukan tidak sedikit orang tua murid yang mengeluh karena tidak ada nya LKS sebagai penunjang belajar anak-anaknya di kelas. Anak-anak pun juga mengeluhkan karena tidak adanya kegiatan renang yg hanya dilakukan satu kali setiap semester.” (Partisipan MK)

Pembahasan



Temuan menunjukkan bahwa kebijakan larangan pungutan tidak menurunkan motivasi guru. Hal ini sejalan dengan *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan, 1985) yang menekankan pentingnya motivasi intrinsik yang didorong oleh kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Guru-guru menunjukkan dedikasi tinggi meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Studi oleh Wahyuti dan Boussanlègue (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan yang memberdayakan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan institusional yang tepat dapat memperkuat motivasi intrinsik guru.

Kebijakan larangan pungutan menyebabkan keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional. Menurut *Motivation Crowding Theory* (Frey, 1997), insentif eksternal yang tidak memadai dapat mengurangi motivasi intrinsik. Guru menghadapi tantangan dalam menyediakan alat bantu pembelajaran yang sebelumnya didukung oleh sumbangan sukarela. Penelitian oleh Halimahturraffiah et al. (2023) menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi kerja guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja mereka. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat pengembangan kompetensi dan motivasi tersebut.

Guru menunjukkan adaptasi positif dengan memanfaatkan bahan ajar digital dan berkolaborasi dengan sesama guru. Menurut *Self-Determination Theory*, dukungan terhadap otonomi dan kompetensi dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Guru yang merasa memiliki kontrol atas metode pengajaran mereka cenderung lebih termotivasi. Studi oleh Stumbrienè et al. (2023) menyoroti pentingnya dukungan dalam transfer inovasi pendidikan berbasis teknologi. Guru yang didukung dalam penggunaan teknologi cenderung lebih termotivasi dan efektif dalam pengajaran.

Guru merasakan bahwa dukungan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan belum optimal. Menurut *Expectancy Theory* (Vroom, 1964), motivasi dipengaruhi oleh harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik dan dihargai. Kurangnya dukungan dapat menurunkan harapan tersebut. Penelitian oleh Ingish et al. (2021) menunjukkan bahwa komunikasi, disiplin kerja, kepemimpinan, dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan kinerja guru. Dukungan institusional yang kuat dapat meningkatkan faktor-faktor tersebut.

Guru berharap pemerintah menyediakan fasilitas pengganti dan pelatihan berkala. Menurut *Self-Determination Theory*, pemenuhan kebutuhan akan kompetensi dan otonomi penting untuk motivasi intrinsik. Pelatihan dan fasilitas yang memadai dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Studi oleh Raza dan Zahra (2024) menunjukkan bahwa program pengembangan profesional guru berdampak positif pada motivasi, praktik pedagogis, dan hasil belajar siswa. Investasi dalam pengembangan profesional dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Guru menilai bahwa kebijakan ini berpotensi memperbaiki hubungan antara sekolah dan masyarakat. Namun, tanpa pendanaan alternatif yang jelas, kebijakan ini bisa menimbulkan frustrasi. Menurut *Motivation Crowding Theory*, insentif eksternal yang tidak memadai dapat mengurangi motivasi intrinsik. Penelitian oleh Wahyuti dan Boussanlègue (2025) menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberdayakan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Dukungan yang tepat dapat membantu guru mengatasi tantangan dan menjaga motivasi mereka.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan pungutan di sekolah negeri tidak mengurangi motivasi guru. Sebagian besar guru tetap berkomitmen tinggi meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Motivasi intrinsik guru, yang didorong oleh tanggung jawab profesional, tetap kuat, dengan mereka beradaptasi melalui kreativitas dan kolaborasi dalam mengatasi keterbatasan fasilitas. Meskipun demikian, kebijakan ini menyebabkan penurunan sarana pendukung pembelajaran, yang sebelumnya didapat dari sumbangan sukarela orang tua. Guru juga mengharapkan dukungan lebih dari pemerintah, berupa fasilitas pengganti dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan. Kebijakan ini berpotensi memperbaiki hubungan antara sekolah dan masyarakat, namun tanpa dukungan yang memadai, dapat menimbulkan



frustrasi di kalangan guru dan orang tua. Dukungan institusional yang optimal sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer Science & Business Media.
- Frey, B. S. (1997). Not just for the money: An economic theory of personal motivation. Edward Elgar Publishing.
- Halimahturrafiyah, N., Marsidin, S., Anisah, & Rifma. (2023). The Influence of Teacher Competence and Work Motivation on the Performance of State High School Teachers. *Journal of Education Research and Evaluation*, 7(3), 362–369. <https://doi.org/10.23887/jere.v7i3.65937>
- Ingsih, K., Astuti, D., Suhana, S., & Ali, S. (2021). Improving Teacher Motivation and Performance through Communication, Work Discipline, Leadership and Work Compensation. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(1). <https://www.abacademies.org/articles/improving-teacher-motivation-and-performance-through-communication-work-discipline-leadership-and-work-compensation-10315.html>
- Lintas Karawang. (2025). Bupati Karawang Instruksikan Larangan Pungutan di Satuan Pendidikan Negeri. Diakses dari: <https://lintaskarawang.com/2025/02/12/bupati-karawang-instruksikan-larangan-pungutan-di-satuan-pendidikan-negeri/>
- Nery, F. S. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri. Universitas Medan Area. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15324/2/181801004%20-%20Fitri%20Sovia%20Nery%20-%20Fulltext.pdf>
- Ningsih, R. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan*. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/337959-pengaruh-motivasi-kerja-guru-terhadap-ki-799c9a9c.pdf>
- Putro, D. A. (2020). Kontribusi Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar. Universitas Widyayuwana. Diakses dari: <https://eprints.widyayuwana.ac.id/id/eprint/637/1/SKRIPSI%20REMASTERED%20%28DAVIT%20ANGGORO%20PUTRO%20182965%29%20FIX%20BE.pdf>
- Rahman, A., & Putri, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Dampak terhadap Guru dan Siswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*. Diakses dari: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/3489>
- Raza, A., & Zahra, N. (2024). Examining the Impact of Primary School Teacher Professional Development Programs on Teacher Motivation, Pedagogical Practices, and Student Learning Outcomes in Pakistan: A Quantitative Analysis. *Indonesian Journal of Educational Science and Technology*, 3(1). <https://doi.org/10.55927/nurture.v3i1.7970>
- Setiawan, R. (2023). Dampak Pendidikan Gratis terhadap Siswa dan Orang Tua. *Jurnal Pendidikan UNS*. Diakses dari: <https://jurnal.uns.ac.id/pendidikan/article/view/12987>
- Stumbrienė, D., Jevsikova, T., & Kontvainė, V. (2023). Key factors influencing teachers' motivation to transfer technology-enabled educational innovation. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11891-6>
- Wahyuti, Y., & Boussanlègue, T. (2025). Empowerment Leadership in Improving Teacher Motivation and Performance in Educational Environments. *PPSDP International Journal of Education*, 4(1), 182–191